

# PEMANTAPAN PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA

**Remon Hendra**

Widyaiswara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Email: remonhendra@yahoo.co.id

**Abstract:** Control of the population at this time is something that should be the principal concern, the family planning program (KB) is the most likely alternative to control the population growth, but the program is still dominated by women. This study aims to identify and analyze the participation of men in the implementation of family planning (FP) in Indonesia. The method used in this study is a qualitative approach, whereas strategy is a case study to investigate the shooting and careful policy of eliminating violence and fulfillment of reproductive health rights of women. Data analysis techniques in this study is a qualitative analysis that connects the empirical facts with theoretical rationale. The results showed the low participation of men in the implementation of family planning (FP) due to the implementation of the program at the beginning of its existence directed to women / mothers, which resulted in the habit still cling to this day, not optimal IEC activities for men or husbands, uneven dissemination of IEC materials on male participation in berKB, and family planning programs and KR approach to men is still lacking.

**Abstrak:** Pengendalian penduduk pada saat ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian pokok, program Keluarga Berencana (KB) merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun program ini masih di dominasi oleh kaum perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi pria dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan strategi yang digunakan adalah studi kasus untuk memotret dan menyelidiki secara cermat kebijakan penghapusan kekerasan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menghubungkan fakta empiris dengan dasar pemikiran teoretik. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya partisipasi pria dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dikarenakan pelaksanaan program yang pada awal keberadaannya diarahkan kepada kaum perempuan/ibu, yang mengakibatkan kebiasaan itu masih melekat sampai saat ini, belum optimalnya kegiatan KIE bagi kaum pria atau suami, tidak meratanya penyebaran materi KIE tentang partisipasi pria dalam berKB, dan pendekatan program KB dan KR kepada pria masih kurang.

**Kata Kunci:** partisipasi pria, program KB, pertumbuhan penduduk

## PENDAHULUAN

Ledakan jumlah penduduk yang terjadi secara terus menerus akan memicu terjadinya kasus kemiskinan yang semakin tinggi pula. Selain itu juga berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta meningkatnya angka pengangguran. Kondisi ini akan menambah beban pengeluaran keuangan daerah, jika ketersediaan anggaran tidak bisa terpenuhi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Karena jumlah penduduk yang padat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengendalian jumlah penduduk sangat penting bagi Indonesia. Mengingat ledakan pertumbuhan penduduk akan membawa implikasi atau dampak besar bagi kehidupan sosial

kemasyarakatan yang tentunya akan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Sebut saja, tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru, dalam situasi perekonomian yang tumbuh sangat lambat, akan menimbulkan problem sosial yang pelik

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia yang diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap sektor-sektor lainnya. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Demikian

pula, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Langkah antisipatif yang pertama dilakukan dalam penanggulangan peningkatan jumlah penduduk adalah dengan pengaturan jumlah peningkatan angka kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) menjadi garda terdepan untuk mengendalikan kelahiran terutama pada era otonomi daerah seperti sekarang ini. Ledakan jumlah penduduk yang akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan mau tidak mau memang harus segera menjadi perhatian pemerintah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau sering dikenal masyarakat dengan Keluarga Berencana (KB), adalah instansi pemerintah yang menangani permasalahan kependudukan dan perencanaan keluarga, Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah diundangkan dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengisyaratkan bahwa pembangunan kependudukan di Indonesia diletakkan dalam konteks pembangunan SDM yang mencakup pembangunan manusia sebagai subjek (*human capital*). Dengan SDM yang berkualitas diharapkan bangsa ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, SDM berkualitas akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri dan orang sekitarnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan bangsa.

Untuk kelancaran dan terlaksananya program ini dengan baik diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar program Kependudukan dan Keluarga Berencana bisa berjalan dengan baik, mulai dari level pemerintah tertinggi (pemerintah pusat) sampai level terendah (pemerintahan daerah), bahkan sampai pada level keluarga itu sendiri, diantaranya perempuan (istri) untuk mendorong suaminya agar menjalankan program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tepat agar terdapat sinergi dari

kedua belah pihak dalam menjalankan fungsi keluarga.

Di beberapa kalangan masyarakat masih beredar stereotip bahwa program keluarga berencana hanya dilakukan oleh perempuan hendaknya harus kita rubah, sebab pengadaan program keluarga berencana itu sendiri pada dasarnya berbasis gender. Berlaku kepada perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera seperti yang digaungkan oleh pemerintah selama ini. Kesertaan pria dalam ber-KB tak bisa ditunda-tunda lagi, karena akan memberikan kontribusi sangat besar terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penanganan kesehatan reproduksi, termasuk penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Tentu semua itu berpengaruh cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebanyakan pria Indonesia masih enggan untuk ber-KB dengan berbagai alasan. Dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), lebih dari 60 persen pasangan usia subur sudah mengikuti program KB, secara nasional kesertaan KB Pria Kurang dari 3 % dengan rincian menggunakan kondom dan 1,2 persen, vasektomi, 0,3.

Berdasarkan data tersebut terdapat ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Disini dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya yang selama ini terjadi dalam program keluarga berencana adalah sebagai upaya untuk menggiring perempuan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi di sini peran suami tidak begitu terlihat, karena stereotip yang telah tertanam selama ini yang membawa kita pada suatu definisi program keluarga berencana adalah program untuk ibu-ibu semata, padahal seorang suami ikut berperan di dalam menciptakan kesejahteraan bagi keluarganya termasuk dalam penentuan jumlah anak.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan strategi yang digunakan adalah studi kasus untuk memotret dan menyelidiki secara cermat kebijakan pe-

nghapusan kekerasan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Indo-nesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menghubungkan fakta empiris dengan dasar pemikiran teoretik. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data dengan dokumen yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang luas dan memiliki alam yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi, kekayaan yang kita miliki tersebut akan tidak mengandung arti apa-apa, apabila kita tidak mampu memelihara sumber daya yang kita miliki tersebut. Sebagai contoh penjarahan hutan lindung dan pembukaan lahan pertanian serta perkebunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian alam dengan cara membakar hutan menimbulkan implikasi negatif terhadap kondisi alam di Indonesia.

Pengendalian pertumbuhan penduduk pun sangat berkaitan erat dengan kebutuhan akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Seperti halnya, ledakan jumlah penduduk juga membutuhkan penyiapan lahan untuk tempat tinggal. Kepadatan suatu wilayah berpengaruh besar terhadap ketersediaan lahan-lahan terbuka yang berfungsi untuk daerah resapan air. Hal ini telah terbukti di banyak kota besar di Indonesia mengalami banjir, akibat semakin menyempitnya lahan-lahan terbuka dan resapan air yang telah beralih fungsi sebagai daerah pemukiman penduduk.

Hasil proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan meskipun pertumbuhan penduduk rata-rata nasional per tahun menunjukkan kecenderungan terus menurun dari 1,38 persen (periode 2010-2015) menjadi 0,62 persen (periode 2030-2035) per tahun. Namun jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun menda-

tang akan terus meningkat dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BKKBN)

Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam KB dan kesehatan reproduksi merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan masyarakat secara luas akan anggapan salah: 'KB urusan perempuan'. Pemberi pelayanan yang memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang adalah contoh bahwa pelayanan tidak diskriminatif gender, dapat diakses dan memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan berpartisipasi sebagai peserta KB. Pemahaman yang tepat akan KB dan kesehatan reproduksi secara bertahap akan mengurangi dominasi suami dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi.

Program KB nasional saat ini menekankan pada paradigma baru, yaitu dengan misi yang menekankan pada pentingnya upaya penghormatan kepada hak-hak reproduksi. Sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga. Baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak reproduksi yang sama baik dalam hal menentukan jumlah anak maupun hak untuk mendapatkan informasi tentang metode KB. Yang termasuk dalam hak reproduksi ini adalah hak untuk berkeluarga berencana. Yang terjadi selama ini seolah-olah keluarga berencana hanyalah hak, kewajiban dan kepentingan wanita saja. Padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antar suami dan istri, tidak hanya menjadi beban satu orang saja.

Namun harapan belum berbanding lurus dengan kenyataan, penulis mengambil contoh dari kesertaan KB pria di Provinsi Riau. Bisa dilihat dari data peserta KB aktif selama 4 (empat) tahun terakhir yang masih didominasi oleh peserta KB wanita, walaupun terdapat kenaikan kesertaan KB Pria namun angkanya masih dibawah 10%. Dalam 4 (empat) tahun terakhir tidak terdapat kenaikan yang signifikan peserta KB aktif pria, bahkan ada kecenderungan fluktuatif ini bisa dilihat dari data tahun 2011 jumlah peserta KB pria 6,8 persen, tahun 2012 berjumlah 6,75 persen dan pada tahun 2013 turun lagi menjadi 6,29 persen.

Dari pengamatan data tersebut dan di kaitkan dengan kesetaraan gender tentu saja data tersebut belum menunjukkan adanya kesetaraan antara pria dan wanita dalam keikutsertaan dalam ber KB. Dimana kesertaan pria dalam berKB tidak sampai menembus angka 10 %.

Banyak hal yang bisa diasumsikan sebagai penyebab belum seimbang nya kesertaan KB antara pria dan wanita. *Pertama*, Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan kondisi saat ini yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga berencana: 16% suami tidak setuju istri ber KB, namun suami tidak ingin menjadi peserta KB, suami masih dominan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga berencana, lebih dari 60 persen penetapan jumlah anak diambil oleh suami, 28% bersama istri dan 10 persen ditentukan oleh istri. *Kedua*, lebih dari 70 persen pria di perkotaan dan di pedesaan berpendapat sebaiknya istri yang menjadi peserta KB, sebagian besar pria berpendapat partisipasi pria dalam ber KB cukup dengan memberikan dukungan kepada istri., dukungan suami kepada istrinya untuk ber KB mencapai lebih dari 90 persen (GASTER, Vol. 8, No. 1 Februari 2011). *Ketiga*, Pertimbangan Sosio-Kultural Bangsa. Meskipun masyarakat telah mengalami perubahan bersamaan dengan proses modernisasi, aspek sosio-kultural masih melekat dalam kehidupan sehari-hari penduduk, sehingga mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan program KB di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan program KB dan kesehatan reproduksi dalam perkembangannya selalu mempertimbangkan aspek sosio-kultural bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan ICPD Kairo bahwa setiap program KB dan kesehatan reproduksi harus sesuai dengan norma, budaya, agama, dan hak-hak azasi manusia yang bersifat universal serta prioritas pembangunan bagi masing-masing bangsa.

Faktor-faktor tersebut amat penting dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi, sehingga keterlibatan berbagai tokoh masyarakat, pemimpin agama, ketua adat dan berbagai komponen yang mewarnai perilaku sosial, termasuk adat istiadat dari berbagai suku bangsa menjadi ciri penting dalam pembaharuan

kebijakan KB (BKKBN, 2010). Motivasi ber-KB pria di Provinsi Riau masih sangat minim bisa saja di karenakan alasan alasan tersebut di atas (diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk membenarkan asumsi ini agar lebih teruji kebenarannya). Namun kendala kendala yang terpapar di atas bisa saja akan menjadi mini jika adanya motivasi yang kuat dari para calon akseptor pria yang akan menjadi peserta KB.

Dengan menggunakan teori motivasi, yaitu adanya keinginan atau dorongan yang ada dalam diri manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Setiap yang dilakukan oleh manusia atau individu pasti memiliki motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam hidupnya. *Pertama*, Motivasi Intrinsik, yaitu berbagai dorongan atau tekanan yang berasal dari dalam diri individu yang berbentuk keinginan yang kuat untuk bekerja. Dalam kasus ini penulis melihat kebanyakan pria belum memiliki keinginan yang kuat untuk mau berpartisipasi dalam menggunakan alat kontrasepsi ataupun ber KB.itu di tandai dengan tidak banyaknya peningkatan jumlah akseptor pria dalam (4) empat tahun terakhir khususnya di provinsi Riau. *Kedua*, Motivasi Ekstrinsik, yaitu berbagai dorongan yang berasal dari luar diri individu dimana motivasi ekstrinsik ini berasal dari lingkungan sosial. Berdasarkan beberapa data di atas, motivasi yang mendorong akseptor untuk berpartisipasi dalam program KB adalah motivasi yang bersifat positif yang berasal dari dalam diri individu atau dari luar individu yang dapat mengakibatkan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Motivasi yang melatarbelakangi akseptor untuk berpartisipasi adalah pertama karena faktor yang ada dalam diri invidu itu sendiri (disini kaitannya dengan suami) untuk menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang ada dengan istri. Yang kedua, faktor dari luar. Disini bisa saja berasal dari orang lain atau lingkungan sosial ekonomi. Dari berbagai motivasi yang melatarbelakangi akseptor untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana dapat dianalisa dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Dalam paradigma ini,

mencakup tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Hal ini dinamakan dengan tindakan sosial. Tindakan yang dilakukan akseptor dalam menggunakan kontrasepsi merupakan tindakan sosial yang diarahkan kepada orang lain (di sini berarti diarahkan kepada istri) untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam keluarga.

Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe, yang menurutnya semakin rasional tindakan yang dilakukan seseorang maka akan semakin mudah dipahami. *Pertama*, *zwerk rational*, yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Bila seorang aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional, maka mudah memahami tindakannya itu. Dalam teori ini akseptor pria diharapkan memahami kontrasepsi dengan segala aspek baik buruknya sehingga seorang akseptor pria (suami) bisa menentukan kontrasepsi yang terbaik yang akan digunakan bersama pasangannya dengan kemungkinan yang terbaik.

*Kedua*, *werktrational action*, yaitu tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri, dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sulit untuk dibedakan. Pada teori ini calon akseptor pria menyadari akan pentingnya penggunaan kontrasepsi yang untuk merencanakan kehidupan ber keluarga, sebagai contoh seorang suami yang menggunakan kontrasepsi karena menyadari bahwa tidak ada kontrasepsi yang cocok untuk pasangannya (istri). *Ketiga*, *affectual action*, yaitu tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si actor. Tindakan sukar dipahami, kurang dan tidak rasional. *Keempat*, *traditional action*, yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja (Ritzer, 2009).

Pendekatan tindakan sosial kepada calon akseptor agar kesertaan KB pria bisa lebih banyak lagi yang akhirnya kesetaraan pemakaian kontrasepsi antara pria dan wanita bisa seimbang. Intinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pria dalam kesertaan ber KB agar terjadi kesetaraan gender dalam pelaksanaan program KB. Salah satunya dengan membangkitkan motivasi calon akseptor tersebut dengan jalan menambah pengetahuan para calon akseptor tentang kontrasepsi untuk pria. Akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menambah pengetahuan tersebut, dan penulis mengharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam lagi untuk menguji teori ini.

## SIMPULAN

Kesadaran akan pentingnya kontrasepsi saat ini masih sangat perlu ditingkatkan guna untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk. Tingkat pemakaian alat kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate (CRP)* masih didominasi oleh wanita. Hal ini bisa dilihat dari capaian peserta KB aktif selama empat tahun terakhir. Dengan demikian, sangat diperlukan penguatan keterlibatan laki-laki dalam KB. Program-program yang berperspektif laki-laki sangat ditunggu oleh masyarakat. Melalui peningkatan keterlibatan laki-laki dalam KB, maka akan berbanding lurus dengan kepedulian laki-laki terhadap hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Terkait dengan analisis gender longwe, di sini didapat bahwa partisipasi yang dilakukan oleh laki-laki menggunakan basis pemikiran gender dengan menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kontrasepsi, sebagaimana metode yang diusung oleh program keluarga berencana. Diharapkan KB adalah urusan bersama antara suami dan istri, mereka memberikan bayangan tentang kerjasama reproduksi yang terjadi antara suami dan istri untuk mendapatkan anak, sehingga tidak akan adil jika dalam urusan KB hanya istri yang berperan, ada baiknya suami juga mempunyai kesadaran dan termotivasi yang sama untuk berperan dalam KB.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2001. *Pedoman Kebijakan Teknis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2004. *Informasi Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. *“Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035”* Jakarta: BKKBN
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- <http://health.detik.com/read/2012/02/24/152734/1850906/763/alasan-pria-indonesia-malas-ber-kb>.